

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

TAHUN : 2019 (April)

PENILAIAN			Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Evidence	Keterangan
A.	PROSES (60)							
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (5)		5.0		4.56	91.20%		
	1	Tim Kerja (1)	1.0		1.00	100.00%		
		a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?	Y/T	Ya	1		1. SK Ketua PA Wonosobo Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Agama Wonosobo tanggal Oktober 2018 Nomor: W11-A8/0101/OT.00/VIII/2018 dan revisi SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Nomor: W11-A8/0487/OT.01.1/II/2019 tanggal 12 Februari 2019	Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja
		b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas ?	A/B/C	A	1		Melalui pemilihan dengan Kriteria Pemilihan Tim Kerja dan berpedoman pemilihan tim Kerja	a. Dengan prosedur/mechanisme yang jelas; b. Sebagian menggunakan prosedur; c. Tidak di seleksi
	2	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)	1.0		1.00	100.00%		
		a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?	Y/T	Ya	1		Terdapat dokumen Rencana kerja pembangunan Zona Integritas	Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas
		b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?	A/B/C	A	1		Semua Target-target prioritas relevant dengan WBK/WBBM	a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
		c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?	Y/T	Ya	1		Rapat sosialisasi WBK/WBBM oleh KPA (Undangan, notulen, Absensi, Dokumentasi terlampir), publikasi pencaangan pembangunan zona integritas melalui Rapat dan Pemasangan Banner dan Spanduk serta pengumuman melalui audio suara setiap 1 jam sekali di ruang tunggu layanan dan persidangan	Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM
	3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)	2.0		1.56	78.00%		
		a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?	A/B/C/D	B	0.67		Sebagian Pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja karena masih dalam tahapan pembangunan	a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana
		b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	A/B/C/D	A	1		Ada sudah dipersiapkan	a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan
		c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?	A/B/C/D	B	0.67		Sebahagian hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti

		4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)	1.0		1.00	100.00%			
			a. Apakah pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?		Y/T	Ya	1		SK Role Model Nomor: W11-A8/2482 /KP.02.1/X/2018 dan SK Penetapan Role model Nomor: W11-A8/0847/KP.05.8/III/2019, tanggal 28 Maret 2019	Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.
			b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?		Y/T	Ya	1		SK Penetapan Agen Perubahan Nomor: W11-A8/0848/KP.05.8/III/2019, tanggal 28 Maret 2019	Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
			c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?		Y/T	Ya	1		Sosialisasi budaya kerja 5 R dan 3 S di dalam setiap rapat koordinasi dan apel senin pagi dan juga pelaksanaan Bintel setiap hari Rabu minggu ke IV setiap bulan	Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
			d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?		A/B/C/D	A	1		Sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: W11-A8/0487/OT.01.1/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang revisi Penunjukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Agama Wonosobo	a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
		II.	PENATAAN TATALAKSANA (5)	5.0			4.25	85.00%		
		1	prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)	1.5			1.50	100.00%		
			a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi		A/B/C/D	A	1		Semua Unit SOP telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras (Peta Bisnis Terlampir)	a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
			b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		A/B/C/D	A	1		Unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan	a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi
			c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi		A/B/C/D	A	1		Sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti dan telah juga ditetapkan Tim Evaluasi SOP pada Pengadilan Agama Wonosobo yang bertugas mengevaluasi, memperbaharui dan merevisi SOP sesuai dengan Peraturan dan ketentuan baru yang berlaku di Pengadilan Agama	a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi
		2	E-Office (2)	2.0			2.00	100.00%		
			a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	A	1		Sistem Pengukuran Kinerja telah menggunakan aplikasi SIMARI, SIPP dan juga dengan menggunakan metode penyusunan realiasi kerja harian yang dituangkan ke dalam Laporan Lembar Kerja Harian yang dilakukan oleh masing-masing pegawai	a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi informasi; c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi
			b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	A	1		Operasionalisasi Manajemen SDM Telah Menggunakan aplikasi SIKEP	a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi
			c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	A	1		Pemberian Pelayanan Publik Telah Menggunakan Teknologi Informasi dalam Aplikasi SIPP untuk penelusuran perkara dan juga mesin antrian sidang yang terkoneksi dengan SIPP	a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi

			d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?		A/B/C/D	A	1		Laporan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik yang dilakukan sebulan sekali	a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan
			3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)	1.5			0.75	50.00%		
			a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan		Y/T	Ya	1		SK Ketua Pengadilan Agama Wonosobo tentang Jenis Layanan Informasi Nomor: W11-A8/0712/HM.00/II/2018 tanggal 23 Februari 2018	Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan
			b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		Y/T	Tidak	0		Belum/dipersiapkan	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
			III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)	15.0			11.65	77.67%		
			1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)	2.0			1.78	89.00%		
			a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?		Y/T	Ya	1		Dokumen Anjab	Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
			b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?		A/B/C/D	B	0.67		Rekrutmen awal tahun untuk pengadaan tenaga kontrak pada Pengadilan Agama Wonosobo telah sesuai antara kebutuhan dengan hasil rekrutmen baik untuk kebutuhan tenaga administrasi, pramubhakti, supir dan dan petugas keamanan	a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
			c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?		Y/T	Ya	1		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai yang direkrut dilakukan setiap tiga bulan sekali	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
			2 Pola Mutasi Internal (2)	2.0			1.78	89.00%		
			a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?		Y/T	Ya	1		Hasil Rapat Baperjakat yang mengusulkan mutasi dan promosi kepada pegawai yang telah memenuhi syarat	Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai
			b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?		A/B/C/D	B	0.67		Pertimbangan tim Baperjakat yang mengusulkan pegawai untuk menduduki jabatan berdasarkan kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut	a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi

			c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		Y/T	Ya	1		Telah dilakukan evaluasi bersamaan dengan rapat beperjaktat yang berdasarkan kepada kinerja pegawai	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
			3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)	3.0			1.34	44.67%		
			a. Apakah Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi ?		Y/T	Tidak	0		Training Need Analysis secara sederhana telah dilakukan di Pengadilan Agama Wonosobo yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, sehingga terlihat kebutuhan diklat yang harus diperoleh oleh setiap pegawai, atas dasar tersebut PA Wonosobo menyusun DDTK untuk kebutuhan diklat tersebut sembari mengusulkan kebutuhan diklat tersebut ke MA	Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
			b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?		A/B/C/D	C	0.33		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
			c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan		A/B/C/D	C	0.33		persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ;	a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ; b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ; c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75% ; d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%
			d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.		A/B/C/D	B	0.67		Upaya yang dilakukan adalah mengusulkan Hakim dan Pegawai yang akan mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis serta melakukan Diklat di tempat kerja (DDTK) untuk kebutuhan diklat yang harus dimiliki oleh Hakim maupun pegawai	a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
			e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?		A/B/C/D	B	0.67		Surat tugas mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Ditjen Badilag serta lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama	a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai; b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai; d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
			f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		A/B/C/D	D	0		Monitoring dan evaluasi baru akan dilakukan per semester sekaligus dilakukannya evaluasi kinerja pegawai	a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan
			4 Penetapan kinerja individu (4)	4.0			2.75	68.75%		
			a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		A/B/C/D	B	0.67		Penetapan Kinerja Individu dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT Tahun 2018 Dokumen terlampir)	a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

			b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		A/B/C/D	A	1		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya (Dokumen Target SKP Sekretaris dan Kepala Sub Bagian terlampir)	a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ; b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ; c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ; d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya
--	--	--	---	--	---------	---	---	--	--	---

			c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		A/B/C/D/E	B	0.75			Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran (Dokumen Realisasi SKP Panitera dan Sekretaris Terlampir)	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
			d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).		A/B/C/D	C	0.33			Belum sepenuhnya	a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward
			5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)	3.0			3.00	100.00%			
			a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan		A/B/C/D	A	1			1. SK Jam Kerja 2. Absen Scan Finger 3. Absen Manual	a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi
			6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)	1.0			1.00	100.00%			
			a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.		A/B/C/D	A	1			Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan (Screenshot Data SIKEP dan ABS terlampir)	a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan; b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulanan; c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran; d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan
			IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	10.0			9.76	97.64%			
			1 Keterlibatan pimpinan (5)	5.0			5.00	100.00%			
			a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan		Y/T	Ya	1			Ya, pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan (dokumen rapat terlampir)	Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
			b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		Y/T	Ya	1			Ya, pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja (dokumen rapat terlampir)	Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
			c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		Y/T	Ya	1			Ya, pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala (dokumen rapat terlampir)/Laporan Evaluasi SAKIP dari TA Semarang, Evaluasi atas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2018, Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017	Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
			2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)	5.0			4.76	95.29%			
			a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada		A/B/C	A	1			Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan (dokumen SAKIP terlampir)	a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ; b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ; c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan
			b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil		A/B/C/D	A	1			Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil (dokumen SAKIP terlampir)	a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
			c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)		A/B/C	A	1			Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direviu (dokumen IKU terlampir)	a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki IKU

		d. Apakah indikator kinerja telah SMART	A/B/C/D	A	1	Indikator kinerja telah mengikuti kaidah SMART (dokumen IKU terlampir)	a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ; c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ; d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART
		e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Y/T	Ya	1	Ya, laporan kinerja telah disusun tepat waktu (dokumen terlampir)	Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
		f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	A/B/C/D	A	1	Pelaporan telah diberikan informasi tentang kinerja (laporan kinerja terlampir)	a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja
		g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	B	0.67	Mengusulkan SDM untuk mengikuti diklat penyusunan progrm dan anggaran	a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
		h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	A/B/C	B	0.5	pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten	a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ; b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten ; c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
	V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)	15.0		9.48	63.20%	
	1	Pengendalian Gratifikasi (3)	3.0		1.50	50.00%	
		a. Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	A/B/C	B	0.5	Telah dilakukan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi	a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign
		b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	A/B/C	B	0.5	telah diimplementasikan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi melalui Brosur dan banner	a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
	2	Penerapan SPIP (3)	3.0		2.75	91.75%	
		a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	A/B/C/D	B	0.67	Telah dibentuk tim Pengendalian SPIP sebagaimana SK Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: W11-A8/0723/OT.01.2/III/2019 tanggal 15 Maret 2019	a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

			b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan		A/B/C/D	A	1		Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja (Risk Register atau Register Resiko telah ada)	a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
			c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		A/B/C	A	1		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dengan melakukan monitoring terhadap risiko untuk menghilangkan dan meminimalisir risiko yang telah dan akan terjadi	a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko
			d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		A/B/C	A	1		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
		3	Pengaduan Masyarakat (3)	3.0			2.13	71.00%		
			a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		A/B/C/D	A	1		Seluruh kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dan telah dibuat inovasi terkait pengaduan masyarakat dengan menunjuk petugas meja pengaduan dan menyebar formulir CPAR bagi masyarakat dan pegawai sendiri	a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
			b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		A/B/C/D	B	0.67		sebahagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti baik melalui rapat pimpinan maupun rapat tinjauan manajemen	a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit
			c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		A/B/C/D	B	0.67		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat setiap bulan (laporan terlampir)	a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan; b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan; c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran; d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan
			d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		A/B/C	B	0.5		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti (Laporan Terlampir)	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja
		4	Whistle-Blowing System (3)	3.0			1.00	33.25%		
			a. Apakah <i>Whistle Blowing System</i> sudah di internalisasi ?		Y/T	Ya	1		Whistle Blowing System telah di internalisasi melalui sosialisasi(notulen dan absensi terlampir)	Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja

			b. <i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	A/B/C/D	D	0		Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
			c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	A/B/C/D	D	0		belum dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> setiap Tahun	a. Jika evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dilakukan bulanan; b. Jika evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dilakukan triwulan; c. Jika evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dilakukan semesteran; d. Jika evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dilakukan tahunan
			d. Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	A/B/C/D	C	0.33		Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> yang ditindaklanjuti unit kerja
			5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3.0		2.10	70.00%		
			a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Y/T	Ya	1		Telah dilakukan identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan	Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
			b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	A/B/C/D	A	1		Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
			c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	A/B/C/D	B	0.67		Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja
			d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	A/B/C	B	0.5		Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi oleh unit kerja tidak secara berkala	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja
			e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	A/B/C/D	C	0.33		Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja

VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10.0			7.82	78.17%	
	1 Standar Pelayanan (3)	3.0			1.76	58.50%	
	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		A/B/C	B	0.5		Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: W11-A8/0713/HM.00/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Standar Layanan Peradilan Pengadilan Agama Wonosobo a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan
	b. Standar pelayanan telah dimaklumkan		A/B/C/D	B	0.67		1. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: W11-A8/0713/HM.00/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Standar Layanan Peradilan Pengadilan Agama Wonosobo 2. Dokumentasi Maklumat Pelayanan 3. Standar Pelayanan Publik di setiap bagian a. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja memaklumkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah memaklumkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
	c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan		A/B/C/D	B	0.67		SOP Pelayanan Informasi a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
	d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP		A/B/C	B	0.5		SK Ketua PA tentang Penunjukan Tim Evaluasi/Penyesuaian Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Wonosobo a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ; b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
	2 Budaya Pelayanan Prima (3)	3.0			2.50	83.40%	
	a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima		A/B/C/D	A	1		Penetapan Rapat Kordinasi Pengadilan Agama Wonosobo (tahun 2018 dan 2019) a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
	b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		A/B/C	A	1		website Pengadilan Agama Wonosobo sebagai media informasi tentang pelayanan, SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA Republik Indonesia tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan Nomor 2. Direktori Putusan 3. SIPP a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media
	c. Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		A/B/C	B	0.5		Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

			d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		A/B/C/D	A	1	<p>1. SK Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Nomor : W11/A8/0655/OT.01.3/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Penunjukan Tim Pengelola PTSP pada Pengadilan Agama Wonosobo</p> <p>2. SOP Pelaksanaan PTSP</p> <p>3. SK Petugas PTSP</p> <p>4. Dokumentasi Progres Program PTSP dan Penilaian Mandiri PTSP</p>	<p>a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu</p> <p>b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu</p> <p>c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu</p> <p>d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu</p>
--	--	--	---	--	---------	---	---	--	--

			e. Terdapat inovasi pelayanan		A/B/C/D	B	0.67		1. Telah Dilaksanakan one day minutes penyelesaian perkara 2. SK One day Publish	a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain; b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain; c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain ; d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
	3	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)		4.0			3.56	89.00%		
			a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		A/B/C	A	1		Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berada pada kategori "BAIK" berdasarkan Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Wonosobo	a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
			b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		A/B/C	A	1		Hasil survey kepuasan masyarakat ini dapat diakses langsung melalui website Pengadilan Agama Wonosobo	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, sebaran, dsb) c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media
			c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat		A/B/C/D	B	0.67		Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat adanya rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan responden sebagaimana disampaikan dalam laporan IKM Tahun 2018	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
TOTAL PENGUNGKIT				60.0			47.52			
B. HASIL (40)										
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)				20.0			16.10	81%		
	1.	Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)		15.0	0-4	3	11.25	75.00%		Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
	2.	Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)		5.0	0-100%	97	4.85	97.00%		
II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)				20.0			20.00	100%		
	1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)		20.0	0-4	4	20.00	100.00%		Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan
TOTAL HASIL				40.0			36.10	0.9025		
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI							83.62			